



**Laporan Kinerja Triwulan 3
BPMP Provinsi Bengkulu
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi Bengkulu selama triwulan 3 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 3	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen				
[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	64,06	Persen	0	0
[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	57,61	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Bengkulu				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Bengkulu dengan kategori sangat baik	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Bengkulu minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Progress/Kegiatan

1. Pendampingan Persiapan Seleksi Sahabat Sekolah Dasar Tahap II Tahun 2025

- Waktu: 11 – 22 Agustus 2025
- Lokasi: 5 Sekolah Dasar di Kota Bengkulu, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, dan Lebong
- Petugas: 11 orang
- Sasaran: 46 peserta

Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kapasitas sekolah melalui program Sahabat SD, yang mendorong pemanfaatan hasil asesmen sebagai dasar perencanaan pembelajaran. Dalam pendampingan ini, guru dan kepala sekolah diperkuat kemampuannya untuk menindaklanjuti hasil asesmen nasional dalam



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan penguatan karakter siswa.

2. Pembekalan Sahabat Sekolah Dasar yang Dilaksanakan oleh Direktorat Sekolah Dasar

- Waktu: 17 – 19 September 2025
- Lokasi: Hotel Atria Serpong
- Petugas: 1 orang

Kegiatan pembekalan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas pelaksana di daerah dalam implementasi program Sahabat SD, yang menitikberatkan pada strategi pemanfaatan hasil asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar.

3. Fasilitasi Pemanfaatan Rumah Pendidikan dan Pengembangan Konten Pembelajaran dalam Mendukung Program Digitalisasi Pembelajaran pada Satuan Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2025

- Waktu Pelaksanaan: 20-22 Agustus 2025 (dilaksanakan bergiliran selama 2-3 hari di 7 kabupaten)
- Lokasi: Hotel di 7 Kabupaten dan BPMP Provinsi Bengkulu
- Jumlah Petugas: 40 orang
- Sasaran: 350 peserta (terdiri atas kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan satuan pendidikan dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran digital melalui platform Rumah Belajar dan pengembangan konten pembelajaran digital. Peserta diberikan pelatihan terkait pengelolaan sumber belajar daring, integrasi hasil asesmen dalam perencanaan pembelajaran, serta strategi pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Melalui kegiatan ini, satuan pendidikan di Provinsi Bengkulu diharapkan mampu mengoptimalkan hasil asesmen nasional dan asesmen formatif di sekolah sebagai dasar dalam menyusun konten pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik.

4. Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP)

- Tanggal: 11 September 2025
- Lokasi: Zoom Meeting
- Jumlah Petugas: 10 orang
- Jumlah Peserta: 385 orang

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman satuan pendidikan mengenai mekanisme pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) dan penggunaannya dalam perencanaan peningkatan mutu sekolah. Melalui sosialisasi ini, satuan pendidikan diperkuat



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

kemampuannya dalam mengidentifikasi capaian mutu, menganalisis hasil asesmen nasional, serta merumuskan strategi peningkatan kualitas pembelajaran.

5. In House Training (IHT) Pengembangan Kapasitas SDM UPT dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan

- Tanggal: 17 September 2025
- Lokasi: Aula Bencoolen BPMP Provinsi Bengkulu
- Jumlah Petugas: 4 orang
- Jumlah Peserta: 37 orang

Kegiatan IHT ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan program penjaminan mutu pendidikan. Materi pelatihan mencakup analisis data mutu, pengelolaan sistem PMP, dan strategi pendampingan sekolah berbasis data hasil asesmen.

6. Sosialisasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Kesetaraan Paket C

- Tanggal: 15 September 2025
- Lokasi: Zoom Meeting
- Jumlah Petugas: 13 orang
- Jumlah Peserta: 350 orang

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyosialisasikan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi peserta didik kesetaraan Paket C agar hasil asesmen dapat digunakan sebagai dasar pengakuan setara dengan jenjang SMA. Kegiatan juga menekankan pemanfaatan hasil TKA dalam penyusunan strategi pembelajaran lanjutan bagi peserta didik lulusan kesetaraan.

Kendala/Permasalahan

1. Terdapat keterbatasan pemahaman awal terhadap program *Sahabat SD* di salah satu sekolah dan komitmen kepala sekolah masih rendah di beberapa lokasi pelaksanaan.
2. Durasi kegiatan yang singkat, yaitu hanya satu hari efektif pada masing-masing lokasi, sehingga pendalaman materi dan praktik pengembangan konten pembelajaran digital belum optimal.
3. Keterbatasan koneksi internet di beberapa lokasi pelaksanaan, yang menghambat proses simulasi dan praktik penggunaan platform digital secara langsung.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menetapkan guru pendamping khusus yang memiliki dedikasi tinggi dan waktu memadai untuk mendampingi siswa dalam proses seleksi dan pelaksanaan program dan melakukan penguatan peran kepala sekolah melalui pendekatan komunikasi langsung dan pendampingan berkelanjutan.
2. Melaksanakan pendampingan lanjutan berbasis komunitas, seperti Komunitas Belajar Guru Digital,



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- untuk memperdalam praktik penggunaan Rumah Belajar dan pengembangan konten pembelajaran.
3. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan penyedia layanan internet untuk meningkatkan infrastruktur jaringan, khususnya pada wilayah kabupaten yang menjadi lokasi pelatihan.

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan

Progress/Kegiatan

1. Sosialisasi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Ramah, dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2025 secara daring melalui Zoom Meeting dengan lokasi koordinasi di BPMP Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta satuan pendidikan dari berbagai jenjang. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta satuan pendidikan dari berbagai jenjang mengenai prinsip-prinsip sekolah ramah anak dalam pelaksanaan MPLS. Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah dan satuan pendidikan memperoleh panduan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan, sebagaimana menjadi salah satu indikator layanan minimal dalam SPM bidang pendidikan.
2. Pemantauan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Ramah diselenggarakan pada tanggal 16–17 Juli 2025 di berbagai satuan pendidikan yang tersebar di Kota Bengkulu, Kabupaten Kaur, Rejang Lebong, Lebong, dan Bengkulu Utara. Sebanyak 36 orang petugas diterjunkan untuk melakukan pemantauan di 36 satuan pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai dengan prinsip ramah anak, aman, dan menyenangkan. Hasil pemantauan memberikan umpan balik bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memperbaiki praktik pelaksanaan kegiatan di sekolah, sehingga turut memperkuat capaian indikator SPM yang menuntut tersedianya lingkungan belajar yang aman, tertib, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.
3. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, dilaksanakan kegiatan Pagi Ceria pada 23 Juli 2025 di BPMP Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai jenjang pendidikan, yaitu siswa SD, SMP, dan SMA, serta melibatkan kerja sama lintas lembaga seperti Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, KGTK Provinsi Bengkulu, dan BAN PDM Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan keceriaan, kreativitas, serta semangat belajar anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Upaya ini sejalan dengan tujuan SPM bidang pendidikan, yaitu menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh anak tanpa diskriminasi.
4. Koordinasi dalam Rangka Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi Data Anak Tidak Sekolah (ATS) serta Pendampingan Implementasi Program Wajar 13 Tahun dan Penanganan ATS, yang dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah, yaitu:
 - Kota Bengkulu (8–9 September 2025)
 - Kabupaten Rejang Lebong (8–10 September 2025)
 - Kabupaten Kepahiang, Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Kaur (10–12 September 2025)



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan total sasaran 151 peserta, yang terdiri atas unsur Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Bunda PAUD, Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas PMD, BPS, Kemenag, Cabang Dinas Pendidikan, perwakilan kecamatan, serta organisasi seperti HIMPAUDI, IGTKI, Forum PAUD, dan PKBM/SPNF. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam upaya penanganan anak tidak sekolah serta mendukung percepatan pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun.

5. Advokasi dan Pendampingan Bunda PAUD dalam Percepatan Wajib Belajar Satu Tahun Pra-Sekolah, yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 September 2025 di Kabupaten Mukomuko, serta pada tanggal 23-24 September 2025 di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh 54 peserta yang terdiri atas Bunda PAUD, Pokja PAUD, HIMPAUDI, IGTKI, dan Forum PAUD. Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat peran strategis Bunda PAUD dalam mendukung implementasi wajib belajar satu tahun pra-sekolah melalui advokasi, sinergi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

6. Advokasi ke Pemerintah Daerah dalam Rangka Sinergi Program Prioritas Kemendikdasmen dan Pendampingan Perencanaan Pemerintah Daerah Terkait SPM Pendidikan

- Waktu: 27 Juli – 7 Agustus 2025
- Lokasi: 9 Kabupaten/Kota dan BPMP Provinsi Bengkulu
- Petugas: 44 orang
- Sasaran: 154 peserta (terdiri atas narasumber, perangkat daerah, dan pengelola pendidikan dasar)

Kegiatan ini secara langsung mendukung pencapaian IKK 1.2 melalui advokasi dan pendampingan pemerintah daerah agar mampu merencanakan serta mengalokasikan anggaran sesuai amanat Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diperkuat kapasitasnya dalam sinkronisasi program prioritas Kemendikdasmen dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

7. Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Revitalisasi Sekolah Dasar Tahap II

- Waktu: 3 – 7 September 2025 (Hotel Atria Gading Serpong)

dan 9 – 12 Juli 2025 (Grand Mercure Harmoni)

- Petugas: 1 orang

Kegiatan ini bertujuan menyempurnakan dokumen perencanaan dan kerja sama antara satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah dasar. Upaya ini berkontribusi pada pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi komponen utama dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

8. Pendampingan Inspektorat Investigasi dan Supervisi Revitalisasi Sekolah Dasar Tahap II

- Waktu: 17 September – 3 Oktober 2025
- Lokasi: Kabupaten Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahiang, Seluma, dan Kota Bengkulu
- Petugas: 55 orang

Dalam rangka menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan *Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025*, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui **BPMP Provinsi Bengkulu** melaksanakan kegiatan **Supervisi Penerima Bantuan Revitalisasi** pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan petunjuk teknis, memastikan penggunaan dana sesuai prinsip efisien dan akuntabel, serta memberikan pembinaan teknis bagi satuan pendidikan penerima bantuan.

Supervisi dilaksanakan melalui **kunjungan lapangan (on-site)** dan **pertemuan konsolidasi (in-office)** dengan melibatkan **Itjen Kemendikdasmen, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Negeri**, serta pendamping teknis BPMP. Kolaborasi lintas lembaga ini memperkuat pengawasan dan pencegahan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Melalui kegiatan ini, BPMP Provinsi Bengkulu berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat akuntabilitas dan transparansi, mempercepat pelaporan progres, serta menumbuhkan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pencegahan.

9. Pemantauan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Bengkulu Tahun 2025

- Waktu: 30 Juni – 10 Juli 2025
- Lokasi: Kabupaten Lebong, Kaur, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Mukomuko, Bengkulu Selatan, dan Kota Bengkulu
- Jumlah Petugas: 54 orang
- Jumlah Sasaran: 152 sekolah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan menengah, memastikan proses seleksi berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan zonasi. Pemantauan ini juga menjadi bagian dari evaluasi implementasi kebijakan layanan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh calon peserta didik.

10. Verifikasi Usulan Penambahan Daya Tampung pada Pelaksanaan SPMB oleh Pemerintah Daerah

- Waktu: 19–21 Agustus 2025 dan 3–4 September 2025
- Lokasi: Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, dan Kota Bengkulu
- Jumlah Petugas: 25 orang
- Jumlah Sasaran: 13 sekolah



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap usulan penambahan daya tampung peserta didik baru oleh pemerintah daerah. Proses verifikasi mencakup pengecekan kelayakan sarana prasarana, rasio guru dan peserta didik, serta kesesuaian dengan data kebutuhan layanan pendidikan.

Kendala/Permasalahan

1. Tidak semua satuan pendidikan dapat mengikuti kegiatan secara optimal karena keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah.
2. Keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan pemantauan belum dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan sasaran.
3. **Koordinasi lintas sektor** masih belum optimal, terutama dalam penetapan mekanisme bersama untuk penanganan anak tidak sekolah.
4. **Koordinasi lintas sektor** dengan Dinas Pendidikan, HIMPAUDI, dan lembaga PAUD nonformal masih perlu diperkuat agar program berjalan efektif.
5. Beberapa undangan tidak disiplin waktu sehingga kegiatan sering dimulai tidak sesuai jadwal dan komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran berbasis SPM masih rendah karena keterbatasan fiskal.
6. Beberapa satuan pendidikan belum menyepakati nilai kontrak atau menolak ketentuan dalam sistem.
7. Beberapa sekolah tidak mematuhi kesepakatan awal mengenai lokasi dan jenis bangunan yang akan dibangun.
8. Spesifikasi konstruksi (rangka baja/ukuran tiang) tidak sesuai dengan ketentuan teknis.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Tim kerja melakukan koordinasi lanjutan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memperdalam pemahaman dan implementasi konsep Sekolah Ramah Anak pada kegiatan tindak lanjut di daerah.
2. Menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan MPLS yang mengacu pada pedoman sekolah ramah anak sebagai acuan bagi sekolah di tahun ajaran berikutnya.
3. Mendorong pemerintah daerah membentuk **tim lintas sektor penanganan ATS** di tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi dan percepatan tindak lanjut program Wajar 13 Tahun.
4. Memfasilitasi **forum koordinasi lintas sektor** secara berkala yang melibatkan HIMPAUDI, IGTKI, dan Forum PAUD guna menyamakan langkah dan memastikan keberlanjutan pelaksanaan program di lapangan.
5. Panitia aktif melakukan komunikasi langsung dengan mitra daerah agar hadir tepat waktu sehingga kegiatan dapat dimulai sesuai rencana dan **advokasi berkelanjutan** untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan SPM pendidikan.
6. Menyesuaikan nilai kontrak berdasarkan *Standar Satuan Harga (SSH)* daerah dan melakukan koordinasi ulang untuk kesepakatan bersama.
7. Dilakukan *adendum* perjanjian serta pendampingan langsung oleh tim Inspektorat Investigasi dan Inspektorat Jenderal untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman teknis.

[SK 2] Meningkatkan tata kelola BPMP Provinsi Bengkulu

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Bengkulu dengan kategori sangat baik

Progress/Kegiatan

1. Melakukan revisi POK menyesuaikan dengan hasil pemantauan Setditjen PDM.
2. Melakukan estimasi serapan anggaran dengan revisi Hal III DIPA.
3. Melaksanakan pelaporan capaian output pada aplikasi SAKTI tepat waktu.
4. Melaksanakan pelaporan keuangan pada aplikasi SAKTI tepat waktu.
5. Melaksanakan sinkronisasi BMN pada aplikasi SAKTI tepat waktu.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Kendala/Permasalahan

Sebagian kegiatan belum bisa dikerjakan tepat waktu sesuai dengan rencana yang ada di DIPA karena efisiensi anggaran.

Strategi/Tindak Lanjut

1. **Melakukan penjadwalan ulang kegiatan** dengan menyesuaikan prioritas pada program/kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian IKK.
2. **Mengoptimalkan moda pelaksanaan alternatif** (misalnya daring atau hybrid) agar kegiatan tetap berjalan meskipun anggaran terbatas.
3. **Menguatkan mekanisme monitoring** agar kegiatan yang tertunda tetap terpantau dan dapat segera dilaksanakan ketika dukungan anggaran tersedia.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Bengkulu

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Bengkulu minimal A

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung ketercapaian IKK 2.2 adalah

1. Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN Semester I Tahun 2025

- Waktu Pelaksanaan: Juli 2025
- Lokasi: Bengkulu

Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) atas pengelolaan BMN Semester I Tahun 2025. Laporan ini mencakup inventarisasi, penilaian kondisi barang, serta tindak lanjut terhadap temuan administrasi maupun fisik aset yang telah dimanfaatkan oleh unit kerja.

2. Penyusunan Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2027

- Waktu Pelaksanaan: September 2025
- Lokasi: Bengkulu

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kerja BPMP Provinsi Bengkulu. Penyusunan laporan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting aset, tingkat urgensi kebutuhan, serta efektivitas pemanfaatan barang yang telah ada.

3. Pengajuan Penggunaan Status Pengguna Barang Milik Negara (BMN)

- Waktu Pelaksanaan: September 2025
- Lokasi: Bengkulu
- Jumlah Aset yang Diajukan:



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

1. 298 unit BMN berupa peralatan dan mesin
2. 2 unit BMN berupa bangunan/gedung
3. 1 unit BMN berupa jalan
4. 1 unit BMN berupa bangunan air

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menertibkan status penggunaan BMN yang telah dimanfaatkan oleh BPMP Provinsi Bengkulu. Pengajuan status pengguna dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan BMN, agar setiap aset yang digunakan tercatat secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Melakukan revisi POK, menyusun ulang TOR kegiatan, menyusun Tindak Lanjut LHE dan Pengukuran Kinerja Triwulan 1 dan 2 melalui aplikasi SPASIKITA dan e-monev bappenas, melakukan Revisi tingkat Satker 13 kali dan Revisi tingkat Unit sebanyak 10 kali, melakukan pelaporan kinerja bulanan 3 kali (sebelum tanggal 10 setiap bulan), melakukan pelaporan output bulanan 3 kali (sebelum tanggal 5 setiap bulan).

5. Selama periode Juli hingga September 2025, Tim Kerja Rumah Tangga BPMP Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan rutin dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi balai, khususnya dalam penyediaan sarana prasarana kegiatan dan pemeliharaan fasilitas gedung kantor. Beberapa kegiatan yang difasilitasi antara lain:

- Kegiatan Balai Bahasa (tanggal 2-4 Juli 2025) yang menggunakan Ruang Pararel.
- Kegiatan BAN PAUD (tanggal 4-5 Juli 2025) yang berlangsung di Aula Bencoolen dan Asrama Soekarno.
- Kegiatan SD IT Al-Azhar (tanggal 5 Juli 2025) yang bertempat di Aula Soekarno.
- Kegiatan PKBM Pelita Bangsa (tanggal 6 Juli 2025) di Aula Soekarno.

Kegiatan pada periode ini sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan fasilitas kantor, termasuk pemeliharaan preventif agar peralatan dan ruangan tetap dalam kondisi optimal bagi seluruh kegiatan kedinasan di lingkungan BPMP Provinsi Bengkulu.

6. Dalam Perkembangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ZI-WBK dalam triwulan ketiga terdiri dari: i) persiapan penilaian dari Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian PAN-Reformasi Birokrasi. Persiapan yang dilakukan adalah penyusunan bahan paparan yang menjabarkan pembangunan ZI-WBK periode 2024 hingga Agustus 2025 dan simulasi persiapan wawancara dalam rangka penilaian yang dimaksud; ii) pelaksanaan penilaian ZI-WBK pada tanggal 20 Agustus 2025. Teknis penilaian adalah penyampaian bahan paparan yang telah disiapkan dan tanya jawab dengan TPN dari KemenPAN-Reformasi Birokrasi; iii) implementasi pembangunan ZI-WBK secara kontinyu sebagai pembuktian saat mystery-guest/ window-shopper datang langsung ke BPMP Provinsi Bengkulu dalam rangka penilaian lapangan dalam rangka seleksi predikat ZI-WBK 2026.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Selain perkembangan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan pembangunan ZI-WBK tetap dilaksanakan Rapat Periodik Bulanan dan Rapat Periodik Catur Wulan yang dihadiri oleh sebagian besar tim-tim pembangunan ZI-WBK, yaitu tim sekretariat ZI-WBK, tim Satuan Pengawasan Interna (SPI), tim Pengelola Pengaduan, dan tim pemilihan ASN Ber-AKHLAK. Seluruh tim merupakan perwakilan semua unsur jabatan dan tim kerja di BPMP Provinsi Bengkulu.

7. Pada bulan Juli s.d. September Tahun 2025, pegawai BPMP Provinsi Bengkulu telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi melalui moda pembelajaran daring dan luring. Secara keseluruhan terdapat 34 orang pegawai yang mengikuti pelatihan pada periode ini. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis, pemahaman regulasi, serta kapasitas pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat mendukung kinerja BPMP Provinsi Bengkulu yang lebih akuntabel dan profesional.

Kendala/Permasalahan

1. Proses pengumpulan data kebutuhan dari masing-masing unit kerja memerlukan waktu yang cukup lama karena belum seluruh unit menyampaikan data secara lengkap dan tepat waktu.
2. Perlu adanya kesesuaian antara data kebutuhan di lapangan dengan ketersediaan pagu indikatif untuk perencanaan tahun anggaran mendatang.
3. Proses verifikasi dokumen membutuhkan waktu lebih lama karena menunggu validasi dari unit teknis di pusat.
4. Terdapat keterlambatan dalam proses input data ke dalam aplikasi SIMAK-BMN akibat padatnya jadwal pelaporan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Sosialisasi dalam menyusun rencana kerja yang lebih terukur secara *cascading* dan termonitor secara terjadwal.
2. Menetapkan batas waktu penyampaian data kebutuhan BMN oleh unit kerja dan melakukan *cross-check* data secara daring melalui formulir digital.
3. Melakukan koordinasi intensif antara tim perencanaan BMN dengan bagian perencanaan dan keuangan agar penyusunan RKBMN selaras dengan kebijakan anggaran yang berlaku.
4. Melakukan komunikasi aktif dengan unit teknis pusat untuk mempercepat proses validasi dan persetujuan penggunaan status BMN.
5. Menyusun jadwal tetap (timeline) pengumpulan data Wasdal secara bertahap agar tidak menumpuk pada akhir periode pelaporan.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7605.QDB.750] Satuan PAUD Dikdas Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	3267	3140	Rp4.277.469.000	Rp1.853.505.160	43.33



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
2	[WA.7606.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp8.000.000	Rp0	0.00
3	[WA.7606.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp290.360.000	Rp0	0.00
4	[WA.7606.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp17.712.962.000	Rp13.097.991.706	73.95
5	[WA.7606.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	0	0	Rp51.640.000	Rp0	0.00
Total Anggaran					Rp22.340.431.000	Rp14.951.496.866	66.93

D. Rekomendasi Pimpinan

Memperhatikan kendala yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan serta mencermati langkah strategi yang akan ditempuh oleh penanggungjawab kegiatan, maka upaya yang dilakukan adalah :

1. Setiap tim agar mencermati POS urusan agar POS yang ada benar-benar dapat mempermudah tercapainya tujuan kegiatan, dan memperbaiki POS yang belum sempurna.
2. Wali wilayah harus diberikan tugas yang lebih jelas sehingga wali wilayah dapat bekerja dengan lebih fokus serta tujuan program dan kegiatan Balai tercapai dengan lebih baik.
3. Secara bertahap SKP Pegawai dijelaskan dengan lebih rinci agar tidak menimbulkan tumpang tindih atau kekosongan penanggungjawab suatu pekerjaan.
4. Perlu kita upayakan untuk membentuk sistem koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dan luwes yang dapat memberikan nilai lebih pada hubungan Balai dengan unit kerja di pemerintah daerah.

Bengkulu, 7 Oktober 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala SABURA SOE'OED PUTRA
---	---



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**